



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
Pada UAKPB Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Jakarta II Kementerian
Kelautan Dan Perikanan

SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep *good governance* merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satuan Kerja Balai KIPM Jakarta II, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan ini merupakan bagian dari Laporan Barang Pengguna (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja ini akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBP-E1) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan . Kemudian. LBPP-EI akan dikompilasi menjadi LBP KKP.

II. DASAR HUKUM

Laporan Barang Pengguna Balai KIPM Jakarta II Semester II Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya

-
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimuktahirkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-531/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.06/2015
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara

-
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Balai KIPM Jakarta II pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019
 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013
 26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018

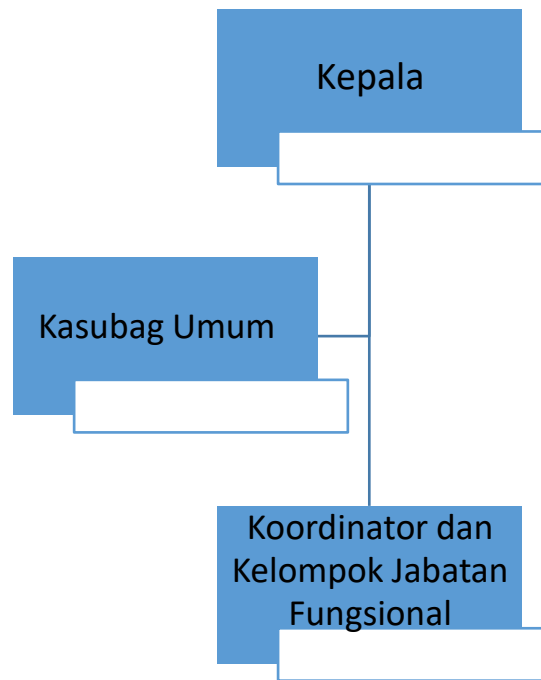
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
30. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
31. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN.
32. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
34. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Work From Home (WFH);
35. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-308/PB/2020 hal Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19;
36. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

III. BALAI KIPM JAKARTA II

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil perikanan. Balai KIPM Jakarta II sebagai Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Struktur organisasi Balai KIPM Jakarta II adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Balai KIPM Jakarta II
(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.92/Permen-KP/2020)



Kelompok Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di Balai KIPM Jakarta II dan umumnya di Badan KIPMKHP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2025, BKIPM Jakarta II memiliki 3 (Tiga) jabatan fungsional tertentu yaitu:

- a. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
- b. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu c.
- Jabatan Fungsional Analis Keuangan APBN

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai BKIPM Jakarta II Tahun 2025

No	Jabatan	Jenjang Fungsional		Jumlah
		Ahli	Terampil	
1	Pejabat Struktural			0
2	Fungsional Umum			4
3	Fungsional Analis APBN	1		1
4	Inspektur Mutu	10		10
5	Asisten Inpektur Mutu		6	5
6	Kontrak			24
Jumlah Pegawai				44

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II beralokasi di Jalan Swasembada Timur XIII Jakarta Utara dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/Permen-KP/2017 Balai KIPM Jakarta II memiliki wilayah kerja:

1. DKI Jakarta
2. Kabupaten Bekasi Utara

Dalam rangka mewujudkan visi BKIPM dan visi KKP, pada periode 2020-2025 Balai KIPM Jakarta II menetapkan visi yang sama yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.”**

Misi yang diemban oleh Balai KIPM Jakarta II untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

- Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional;
- Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintah di KKP.

IV. PERIODE LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Laporan Barang Pengguna Balai KIPM Jakarta II KKP Semester II Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 2 peraturan tersebut, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBKP Balai KIPM Jakarta II sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pembantu Pengguna Barang Balai KIPM Jakarta II dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN di lingkungan Balai KIPM Jakarta II.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas LBKP Balai KIPM Jakarta II sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP Balai KIPM Jakarta II dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan

Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

3. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya Rp25.000.000,00 atau lebih;
- b) BMN berupa Peralatan dan Mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,00 atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih

Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:

- a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
- b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas
- c) Perubahan spesifikasi barang.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

4. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Aplikasi untuk pelaksanaan penatausahaan BMN, yakni Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan SIMAK-Persediaan, yang digunakan pertama kali pada tahun 2008, hingga kini masih digunakan pada penyusunan LBP BMN KKP. Namun, Aplikasi yang semula digunakan pada setiap level unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB), kini hanya digunakan pada level UAKPB guna pencatatan transaksi-transaksi Barang Milik Negara, baik moneter maupun nonmoneter. Versi terakhir yang digunakan hingga periode pelaporan ini adalah Aplikasi SAKTI.

5. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN

Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya. Masa manfaat aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2013. Proses dilakukan untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2012 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2013.

Kemudian penyusutan reguler Semester I dijalankan oleh aplikasi per 30 Juni 2013; dilakukan terhadap: (a) Aset Tetap dan sebagian Aset Tetap BMN 2012 yang telah disusutkan pertama kali, namun masih memiliki nilai dan masa manfaat; (b) Aset Tetap BMN dan sebagian Aset Tetap perolehan Semester I Tahun 2013. Penyusutan reguler dilakukan secara periodik semesteran, mulai periode Semester I Tahun 2013 dan seterusnya.

6. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, software, lisensi, dan waralaba (franchise). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya.

Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2016. Selanjutnya, Aset Tak Berwujud diamortisasi setiap semester.

7. Rekonsiliasi Nilai BMN *Online* melalui e-Rekon & LK

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sejak penyusunan LBPBMN Semester I Tahun 2018 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data SIMAK-BMN berjenjang, yang semula dijalankan secara *offline*, kini menggunakan mekanisme rekonsiliasi *online*, yaitu e-Rekon & LK melalui situs <http://e-rekon-lk.djpbnn.kemenkeu.go.id>.

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN online, yang baru dilaksanakan pertama kali, setiap UAKPB melakukan *upload* saldo awal SIMAK-BMN Tahun 2018, yakni saldo BMN per 31 Desember 2017 (*Audited*), sebagai *base data* online SIMAK-BMN dalam e-Rekon & LK. *Upload* saldo awal ini dilakukan sekali, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Kemudian, rekonsiliasi dalam e-Rekon & LK secara periodik dilakukan melalui pengiriman data SIMAK-BMN ke SAIBA, yang didahului dengan penggabungan data dari Persediaan serta rekonsiliasi internal SIMAK-BMN vs. SAIBA.

Melalui mekanisme rekonsiliasi *online* SIMAK-BMN ini, data Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan terintegrasi sepenuhnya dalam e-Rekon & LK. Dengan rekonsiliasi data online ini, UAKPB tidak harus melakukan rekonsiliasi data LBP BMN secara manual di KPKNL. Kemudian, pelaporan berjenjang pada level Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Balai KIPM Jakarta II (UAPPB-E1), dan Uanit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) telah terintegrasi dalam e-Rekon&LK.

Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui *upload* data saldo awal dan pengiriman data ke SAIBA, UAKPB juga harus melakukan pemutakhiran data BMN secara online dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

VI. KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Satu Data KKP

Program Satu Data KKP atau *One Data System* merupakan proses pengambilan data melalui satu pintu pengumpulan data dan satu sumber pelaporan data kelautan dan perikanan. ~~One Data System~~ dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan data baku yang didukung oleh

metadata yang standar dan dikelola dalam satu portal. Tantangan yang dihadapi dalam penyajian satu data adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data. Implementasi *One Data System* ini merupakan tindak lanjut atas penunjukan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu Kementerian/Lembaga percontohan atau *pilot project* program „Satu Data” atau *One Data System*. Program ini digagas agar KKP terus dapat menghimpun hasil kinerja seluruh unit organisasi dalam satu wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni website resmi KKP.

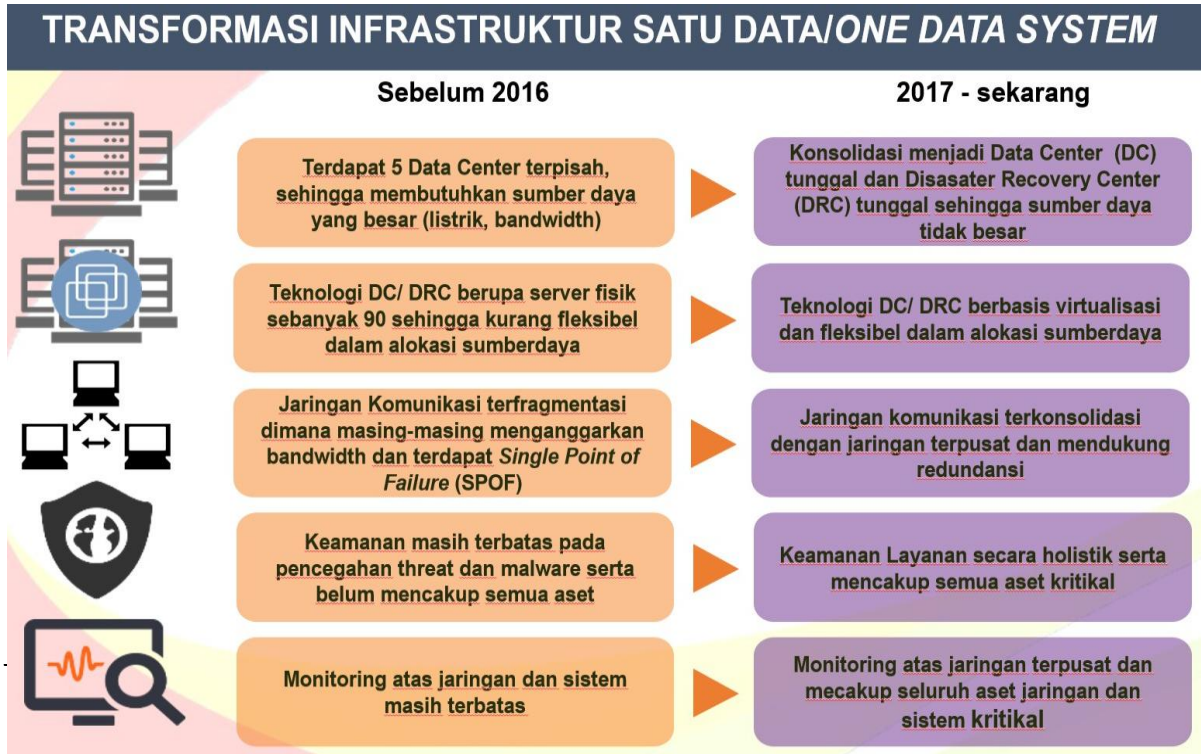
One Data System KKP dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan *One Data System* dilakukan oleh: Unit Data Kementerian, Unit Data Balai KIPM Jakarta II, Forum Satu Data, dan Komisi Satu Data. Unit kerja yang ditunjuk sebagai Unit Data Kementerian atau koordinator pelaksana program adalah Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal KKP. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022

Pelaksanaan program *One Data System* KKP meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data, dan diseminasi. Sedangkan langkah fundamental kebijakan Satu Data KKP meliputi:

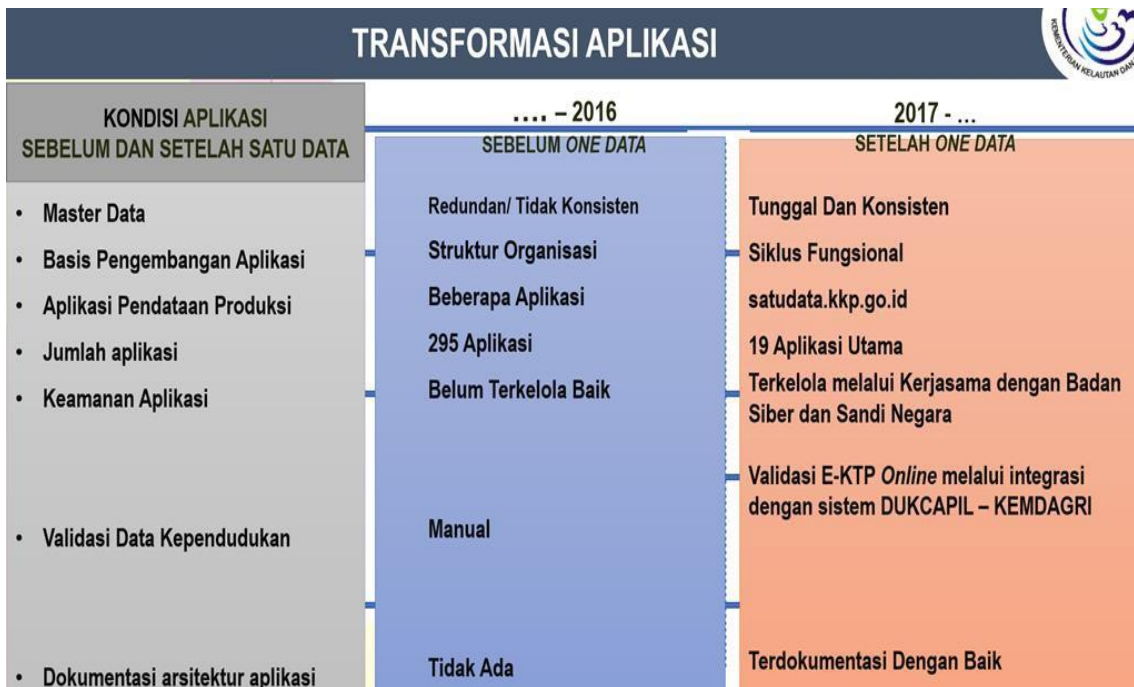
- 1) Moratorium Sistem Informasi Tahun 2016
- 2) Persetujuan Pusdatin untuk Pengadaan SI 2016
- 3) Anggaran Sistem Informasi KKP Tahun 2017 di Pusdatin
- 4) Alih Status Sistem Informasi
- 5) Rasionalisasi Sistem Informasi
- 6) Pendataan SDM Sistem Informasi
- 7) Alih tugas SDM Sistem Informasi ke Pusdatin

Langkah-langkah tersebut, secara teknis berupa transformasi teknologi informasi, baik infrastruktur maupun aplikasi, untuk mewujudkan satu data center, yang meliputi integrasi data dan aplikasi dalam jaringan terpusat

Gambar 3
Transformasi Infrastruktur One Data System

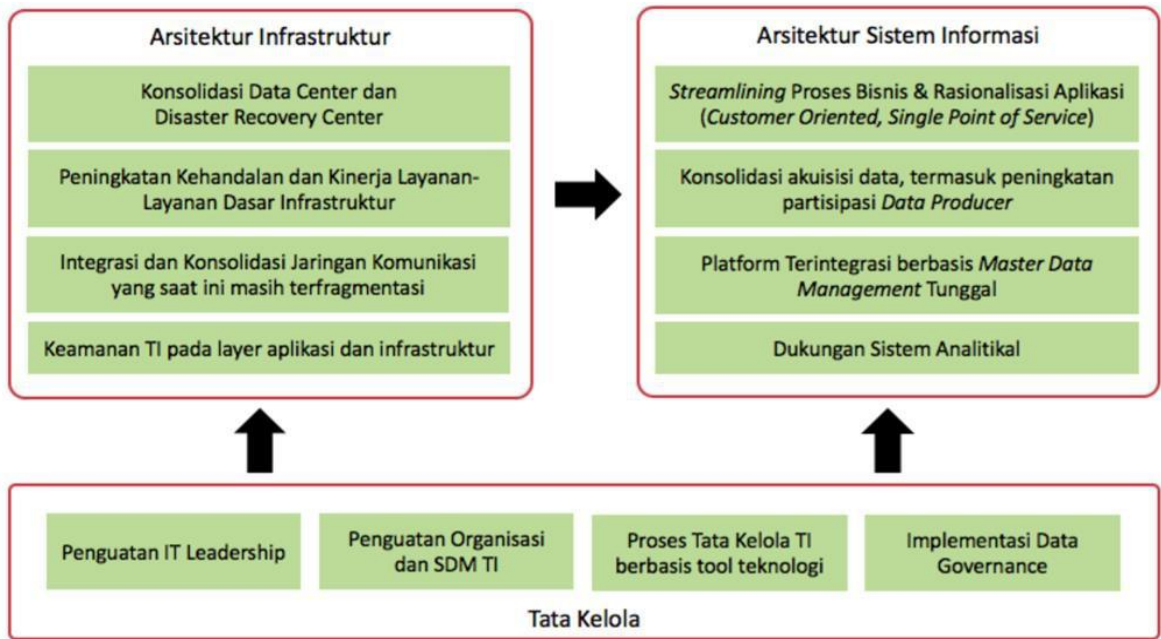


Gambar 4
Transformasi Aplikasi



Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018, strategi transformasi terbagi dalam kelompok Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Tata Kelola TI, yang diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.

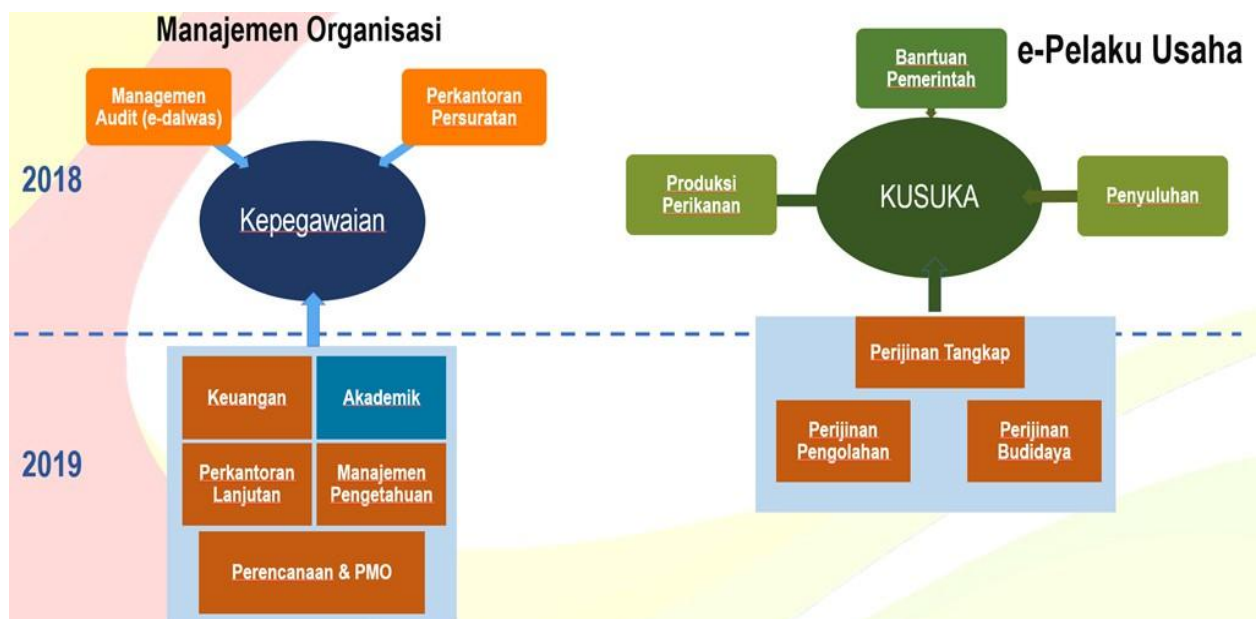
Gambar 5
Strategi Transformasi Teknologi Informasi



Transformasi aplikasi, selanjutnya akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Aplikasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi internal yang berbasis data pegawai dan data keuangan
2. Aplikasi yang berkaitan dengan Stakeholders Berbasis Data Pelaku Usaha (KUSUKA).

Gambar 6
Integrasi Aplikasi sesuai dengan One Data System



Capaian Program *One Data System* KKP dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 7
Capaian Program Satu Data/One Data System KKP



Proses transformasi infrastruktur guna mewujudkan integrasi data center, dalam hubungannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara, diimplementasikan dalam pengumpulan Barang Milik Negara dari unit-unit kerja KKP untuk diserahkan kepada Satker Pusdatin. Progres pengumpulan BMN dalam rangka One Data System diuraikan dalam bagian Pengungkapan Penting Lainnya dalam laporan ini.

B. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP akan dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kuasa Pengguna Barang harus menerbitkan Surat Keterangan Penghentian KDP dengan persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Selanjutnya KDP tersebut harus

dieliminasi/dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila telah terbit persetujuan dari Pengelola Barang, selanjutnya satker melakukan input transaksi eliminasi/penghapusan KDP dari SIMAK-BMN melalui menu transaksi Penghapusan/Penghentian KDP. Transaksi tersebut menimbulkan jurnal akuntansi berikut:

Debet Beban Non Operasional XXX

Kredit Konstruksi dalam Pengerjaan XXX

Informasi mengenai penghapusan KDP terdapat dalam uraian mutasi KDP

VII. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Balai KIPM Jakarta II KKP periode Semester II Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Balai KIPM Jakarta II KKP hingga 31 Desember 2025.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Pengguna UAKPB (LBKP) Balai KIPM Jakarta II KKP ini adalah sebesar Rp 28,322,533,301,-(Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 28,364,614,301,- (Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp 42.081.000,- (Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/ atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan ini juga disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Daftar Gambar
4. Daftar Tabel
5. Neraca Balai KIPM Jakarta II Anggaran 2025, per tanggal 31 Desember 2025
6. Laporan Barang Persediaan
7. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang

8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per Sub Kelompok Barang
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Kondisi Barang
12. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang
13. Laporan Barang Hilang
14. Laporan Barang Rusak Berat
15. Laporan Barang Hibah DK/TP
16. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
17. Catatan atas LBKP
Catatan atas LBKP menyajikan informasi mengenai nilai BMN Balai KIPM Jakarta II KKP per tanggal 31 Desember 2025, catatan ringkas mutasi BMN pada Balai KIPM Jakarta II KKP periode Tahun Anggaran 2025
18. Lampiran, yang terdiri dari: Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN dan lampiran lainnya.

VIII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II TAHUN 2025

A. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan

Nilai BMN per 01 Januari 2025 sebelum penyusutan menurut Balai KIPM Jakarta II adalah sebesar Rp 28.364.614.301,- yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) sebesar Rp 28,254,692,251,- dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 109,922,050, Sedangkan saldo BMN per tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp 28,322,533,301,- BMN gabungan yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp 28,212,611,251,- dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 109,922,050,-

Tabel A.1

**Perubahan Nilai BMN Persediaan, Intrakomptabel, dan Ekstrakomptabel Sebelum Penyusutan
Per 31 Desember 2024 Audited dan 31 Desember 2025
di Balai KIPM Jakarta II KKP**

Kode	Uraian	31 Desember 2024 Audited	31 Desember 2025	Naik atau (Turun)	%
Aset Lancar					
1171	Persediaan	516.354.792	262.976.983	253.377.809	-
	Jumlah Aset Lancar	516.354.792	262.976.983	253.377.809	-
INTRAKOMPTABEL					
Aset Tetap					
1311	Tanah	10.118.066.000	10,118,066,000	-	-
1321	Peralatan dan Mesin	12.756.545.248	12.593.400.877	163.144.371	-
1331	Gedung dan Bangunan	5.361.406.003	5.482.469.374	121.063.371	-
1341	Jalan Irigasi dan Jaringan	18.675.000	18,675,000	-	-
1351	Aset Tetap Lainnya ¹⁾	-	-	-	-
1361	Konstruksi Dalam pengerjaan	-	-	-	-

	Jumlah Aset Tetap	28.254.692.251	28,212,611,251	42.081.000	-
	Aset Lainnya				
1621	Aset Tak Berwujud	349.800.000	746,600,000	396.800.000	-
1661	Akumulasi Penyusutan aset	(349.800.000)	(746,600,000)	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-	-	-
	TOTAL INTRAKOMPTABEL & PERSEDIAAN	29.120.847.043	29.222.188.234	12.352.083	-
	EKSTRAKOMPTABEL				
1321	Peralatan dan Mesin	109.922.050	109.922.050	-	-
1331	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
1351	Aset Tetap Lainnya ¹⁾	-	-	-	-
1661	Aset Lain-lain ²⁾	-	-	-	-
	TOTAL EKSTRAKOMPTABEL	109.922.050	109.922.050	-	-
	TOTAL GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA	29.230.769.093	29.332.110.284	180.630.742	-
Catatan :					
1) Aset Tetap Lainnya merupakan penjumlahan dari nilai Aset Tetap Lainnya hasil output dari aplikasi SIMAK					
2) Aset Lain-lain merupakan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.					

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 31 Desember 2025

Mutasi BMN per Semester II Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 262.976.983,- yang terdiri dari saldo awal Rp 516.354.792,- dan total mutasi selama Semester II Tahun 2025 Rp 253.377.809,- Jumlah tersebut dirinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Rincian Mutasi Persediaan di Balai KIPM Jakarta II Semester II Tahun 2025,
Per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Fluktuasi (%)
117111	Barang Konsumsi	152.268.444	51.223.863	101.044.581	33,64
117112	Amunisi	-	-	-	-
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-	-
117114	Suku Cadang	4.402.658	4.402.658	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Legas	-	-	-	-
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-
117125	Jalan, Irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada	-	-	-	-
117131	Bahan Baku	359.683.690	197.751.288	161.932.402	54,99
117191	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-
117199	Persediaan Lainnya	-	-	-	-
TOTAL		516.354.792	253.377.809	262.976.983	88,63

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama tahun 2025, menurut jenis transaksi, berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi Persediaan.

Tabel 1.2
Rincian Mutasi Persediaan Pada Balai KIPM Jakarta II Menurut
Jenis Transaksi dalam Aplikasi Persediaan Tahun 2025

Uraian Transaksi		Nilai
Saldo Awal, 1 Januari 202 (31 Desember 2024)		516.354.792
Mutasi Tambah		206.398.000
M01	Penambahan Saldo Awal	-
M02	Pembelian	2.997.000
M03	Transfer Masuk	203.401.000
M07	Reklas Masuk	-
M99	Koreksi Tambah	-
Mutasi Kurang		459,775,809
K01	Pemakaian	437.246.100
K02	Transfer Keluar	-
K04	Barang Usang	22.529.709
K05	Barang Rusak	-
K08	Strategis/berjaga-jaga	-
K10	Reklas Keluar	-
K99	Koreksi Kurang	-
KO	Penyesuaian Nilai Persediaan	-
P	Hasil Opname Fisik	-
Saldo Akhir, 31 Desember 2025		262.976.983

Transaksi mutasi Persediaan diuraikan di bawah ini.

1) Saldo Awal

Saldo awal 1 Januari 2025 merupakan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*), senilai Rp. 516.354.792 (Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Adapun rincian saldo awal per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Saldo Awal Persediaan Balai KIPM Jakarta II Semester II Tahun 2025
Menurut Jenis Akun dalam Aplikasi Persediaan

Akun	Uraian Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	152,268,44
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	4.402.658
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0

117131	Bahan Baku	359.683.690
117199	Persediaan Lainnya	-
Total Saldo Per 01 Januari 2025		516.354.792

2) Mutasi Persediaan Tahun 2025

Saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp 262.976.983,- diperoleh dari penjumlahan saldo awal senilai Rp 516.354.792,- dengan seluruh mutasi yang terjadi selama periode 2 Juli – 31 Desember 2025.

Mutasi Tambah (2.1) pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Penambahan Saldo Awal; (2) Pembelian; (3) Transfer Masuk; (4) Hibah Masuk; (5) Perolehan Lainnya; (6) Reklasifikasi Masuk; (7) Koreksi Tambah. **Mutasi Kurang (2.2) pada transaksi persediaan meliputi transaksi** (1) Pemakaian; (2) Transfer Keluar; (3) Barang Usang; (4) Barang Rusak; (5) Penghapusan Lainnya; (6) Strategis/ Berjaga-jaga; (7) Penyerahan Kepada Masyarakat; (8) Reklasifikasi Keluar; (9) Koreksi Kurang. **Penyesuaian Nilai Persediaan (2.3)** merupakan transaksi yang disebabkan atas penggunaan harga terakhir pembelian dalam aplikasi e-rekon dan transaksi koreksi tambah atau kurang. Penyesuaian berdasarkan hasil **Stock Opname (2.4)** persediaan merupakan transaksi penambahan atau pengurangan nilai persediaan berdasarkan hasil stock opname per 31 Desember 2025.

Nilai persediaan pada Balai KIPM Jakarta II mengalami kenaikan/penurunan. Nilai kenaikan/penurunan tersebut merupakan akumulasi atas mutasi tambah persediaan senilai Rp 206,398,000,- mutasi kurang senilai Rp 459,775,809,- dan penyesuaian nilai persediaan senilai Rp 0,-.

I. Mutasi Tambah (M01, M02, M03, M06, M07, M99)

Mutasi Tambah pada Balai KIPM Jakarta II sebesar Rp 206,398,000,- terdiri atas transaksi :

(a) M02 – Pembelian

Transaksi pembelian selama periode pelaporan Semester II tahun 2025 senilai Rp 2.997.000,- merupakan realisasi belanja pembelian untuk: 1) Persediaan operasional perkantoran; 2) persediaan bahan dan peralatan uji penunjang kegiatan laboratorium 3) persediaan Sertifikat Kesehatan dan Mutu Hasil Perikanan. Nilai transaksi pembelian tersebut jika dibandingkan dengan realisasi belanja pembentuk tersebut jika dibandingkan dengan realisasi belanja pembentuk persediaan sudah tidak terdapat selisih yang ditunjukkan dengan tidak adanya “persediaan belum diregister” pada aplikasi e-rekon per 31 Desember 2025.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah:

Tabel 2.1
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian Pada Balai KIPM Jakarta II
Per 31 Desember 2025

Akun	Uraian Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	2.997.000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-
117114	Suku Cadang	-
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	-
Total Pembelian Per 31 Desember 2025		2.997.000

(b) M03 - Transfer Masuk (TM) dan K02 – Transfer Keluar (TK)

TM-TK merupakan transaksi perubahan non Kas antar entitas akuntansi / satker dalam satu eselon I maupun antar eselon I di lingkungan KKP. Transaksi ini terjadi karena entitas KKP memberikan persediaan kepada entitas KKP yang lainnya. Nilai Transfer Masuk pada Periode Semester II TA.2025 memiliki saldo Rp 206,398,000,-

Rincian Persediaan per akun barang atas transaksi TM-TK adalah:

Tabel 2.2
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi TM-TK Pada Balai KIPM Jakarta II
Per 31 Desember 2025

Akun	Uraian Akun	K02 Tranfer Keluar	M03 Transfer Masuk	Selisih
117111	Barang Konsumsi	-	^s 163.909.296	^s 163.909.296
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
117131	Bahan Baku	-	42.488.704	42.488.704
Total TK-TM Per 31 Desember 2025		-	206.398.000	206.398.000

Penjelasan rinci atas transaksi tersebut yaitu pada pelaporan Semester II tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II menerima persediaan dari Sekretariat BKIPM senilai Rp. 163,909,296,- yakni berupa Health Sertificate (HC) yang digunakan untuk operasional pelayanan Balai KIPM Jakarta II dan transfer keluar senilai Rp 0,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat selisih nilai TM-TK dengan Sekretariat BKIPM maupun Balai KIPM Jakarta II.

(c) M07 - Reklas Masuk (RM) dan K10 – Reklas Keluar (RK)

Saldo Reklas Masuk pada periode 31 Desember 2025 TA. 2025 senilai Rp. 0,-, sedangkan nilai Reklas Keluar pada periode 31 Desember 2025 TA. 2025 adalah sebesar Rp. 0,-. Tidak terdapat selisih antara Reklas Masuk dan Reklas Keluar.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi RM-RK adalah:

Tabel 2.3
Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi RM-RK Pada Balai KIPM Jakarta II
Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Reklas Keluar	Nilai Reklas Masuk	Selisih
117111	Barang Konsumsi	-	-	-
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
117114	Suku Cadang	-	-	-
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
117131	Bahan Baku	-	-	-
117199	Persediaan Lainnya	-	-	-
Total RK-RM Per 31 Desember 2025		-	-	-

✓ Tidak terdapat selisih RM-RK pada Balai KIPM Jakarta II.

II. Mutasi Kurang (K01, K02, K04, K05, K06, K09, K10, K99)

(a) K01 – Pemakaian

Transaksi pemakaian senilai Rp 459,775,809,- merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Persediaan ini berupa barang konsumsi yang terdiri dari alat tulis kantor, komputer supplies, cetakan, sertifikat uji mutu perikanan, bahan baku berupa bahan laboratorium, bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung berupa pembersih lantai, pengharum ruangan, suku cadang berupa glassware peralatan laboratorium dan lain sebagainya. Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian adalah:

Tabel 2.4
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian
Pada Balai KIPM Jakarta II per 31 Desember 2025

Akun	Uraian Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	215.133.159
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	4.402.658
117121	Pita Cukai. Materai dan Leges	-
117131	Bahan Baku	240.239.992
117199	Persediaan Lainnya	-
Total Pemakaian Per 31 Desember 2025		459.775.809

Habis pakai +

barang usang

(b) K04 – Barang Usang dan K05 – Barang Rusak

Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak selama periode Semeseter II TA 2025 masing-masing senilai Rp 23.669.051,- dan Rp 0,-. Barang usang merupakan barang persediaan yang secara fisik tidak dapat digunakan karena telah kadaluarsa. Rincian Persediaan per akun atas transaksi Barang Usang dan Barang Rusak adalah :

Tabel 2.5

**Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak
Pada Balai KIPM Jakarta II per 31 Desember 2025**

Akun	Uraian Akun	K04 Barang Usang	K05 Barang Rusak
117111	Barang Konsumsi	23.669.051	-
117131	Bahan Baku	-	-
Total Per 31 Desember 2025		23.669.051	-

III. Penyesuaian Nilai Persediaan

Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp 0 merupakan akumulasi yang berasal dari transaksi harga pembelian terakhir dan koreksi keluar/masuk (atau alasan lainnya). Rincian akumulasi transaksi penyesuaian nilai persediaan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6

**Transaksi Penyesuaian Nilai Persediaan Per Akun
Pada Balai KIPM Jakarta II
Per 31 Desember 2025**

Akun	Uraian Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	-
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-
117114	Suku Cadang	-
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-
117131	Bahan Baku	-
117199	Persediaan Lainnya	-
Total Penyesuaian Per 31 Desember 2025		-

Balai KIPM Jakarta II sudah tidak memiliki Penyesuaian Nilai Persediaan disebabkan pada Semester II TA.2025 Balai KIPM Jakarta II sudah menggunakan aplikasi Persediaan berbasis FIFO (First In First Out).

2. Tanah

Balai KIPM Jakarta II memiliki saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 Rp 10.118.066.000,-. Adapun asset tanah yaitu satu bidang tanah di Jalan Swasembada Timur XIII No. 64 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 12.703.322.927.- jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 12.866.467.298.- mutasi tambah sebesar Rp 1.279.714.921.- dan mutasi kurang sebesar Rp1.442.859.292.-. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

Tabel 3
Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Jakarta II Tahunan
Per 31 Desember 2025

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2024 (Audited)		778	12.756.545.248	230	109.922.050
Mutasi Tambah		-	-	-	-
100	Penambahan Saldo Awal	-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
102	Transfer Masuk	1	354.719.000		
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	18	923.796.921	6	1.199.000
177	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	-	-	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-	-	-
208	Pengembangan Melalui KDP	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-	-	-	-
302	Transfer Keluar	18	923.796.921	6	1.199.000
304	Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	5	517,863,371	-	-
308	Usulan Barang Hilang Ke Pengelola	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025 (UnAudited)		774	12.593.400.877	230	109.922.050

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Bantu (3.01)

Balai KIPM Jakarta II memiliki Saldo Alat Bantu pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2024 sebanyak 1 unit Rp 1.500.000.- terdapat penambahan senilai Rp. 289.256.000,- sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 sebanyak 1 unit Rp. 290.756.000.-.

Tabel 3.1
Ringkasan Mutasi Alat Bantu
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Jakarta II Per 31 Desember 2025

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2024 (Audited)		1	1.500.000.-	-	-
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
102	Transfer Masuk	-	-		
107	Reklasifikasi Masuk	2	289.256.000		
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-		
Mutasi Kurang		-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)				
302	Transfer Keluar	-	-		
304	Reklasifikasi Keluar	-	-		
308	Usulan Barang Hilang Ke Pengelola	-	-		
401	Penghentian Aset Penggunaan	-	-		
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		3	290.756.000.-	-	-

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna per 01 Januari 2025 adalah sebanyak 15 unit senilai Rp. 1,926,724,500. terdapat mutasi penambahan sebanyak 1 unit Senilai Rp 354.719.000.- sehingga Saldo per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 16 unit senilai Rp2.281.443.500.-.

Tabel 3.1
Ringkasan Mutasi Alat Angkutan
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Jakarta II Per 31 Desember 2025

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2024 (Audited)		15	1.926.724.500	-	-
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
102	Transfer Masuk	1	354.719.000		
107	Reklasifikasi Masuk	-	-		
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-		
Mutasi Kurang		-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)				
302	Transfer Keluar	-	-		
304	Reklasifikasi Keluar	-	-		
308	Usulan Barang Hilang Ke Pengelola	-	-		
401	Penghentian Aset Penggunaan	-	-		
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021		16	2.281.443.500	-	-

Dari jumlah Alat Angkut di atas, tidak terdapat alat angkut yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, tidak terdapat proses pemindah tangan/ penghapusan, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Alat Angkut Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	16	2.281.443.500	-	-
Rusak Ringan	0	0	-	-
Rusak Berat	0	0	-	-

c. Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Ukur pada Laporan Kuasa Pengguna Barang periode per 31 Januari 2025 adalah sebanyak 3 unit senilai Rp.61.883.000.-, jumlah tersebut merupakan saldo awal dan tidak terdapat mutasi tambah/ atau kurang sampai dengan 31 Desember 2025.

Dari jumlah Alat Ukur di atas, tidak terdapat Alat Ukur yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan. Dari jumlah Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Alat Bengkel dan Alat Ukur Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	5	61.883.000	0	363,000
Rusak Ringan	0	0	-	-
Rusak Berat	0	-	-	-

Akumulasi Penyusutan Alat Ukur pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 61.883.000.

d. Alat Pengolahan (3.04)

Balai KIPM Jakarta II memiliki Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang periode per 1 Januari 2025 adalah sebanyak 8 unit senilai Rp.19.375.000.00. jumlah tersebut merupakan saldo awal dan tidak terdapat mutasi tambah/ atau kurang sampai dengan 31 Desember 2025.

Dari jumlah Alat pengolahan pertanian di atas, tidak terdapat Alat pengolahan pertanian yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Pengolahan Pertanian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Alat Pengolahan Pertanian Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	8	19.375.000	-	-
Rusak Ringan	0	0	-	-
Rusak Berat	0	-	-	-

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 19.375.000,-

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 590 unit senilai Rp. 2.494.775.686,-, jumlah tersebut merupakan saldo awal. Terdapat penambahan sebanyak 7 unit senilai Rp. 127.884.371 dan pengurangan sebanyak Rp. 242.126.742,-, sehingga saldo akhir pada 31 Desember 2025 sebanyak Rp. 2.379.697.315,-

Tabel 3.4

**Ringkasan Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Jakarta II Per 31 Desember 2022**

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2024 (Audited)		369	2.494.775.686	221	108.018.050
Mutasi Tambah		-	-	-	-
100	Saldo Awal	-	-		
101	Pembelian	-	-	-	-
102	Transfer Masuk	-	-		
107	Reklasifikasi Masuk	7	127.049.371	4	836,000
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-		
Mutasi Kurang		-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	4	121.063.371		
302	Transfer Keluar				
304	Reklasifikasi Keluar	4	121.063.371		
308	Usulan Barang Hilang Ke Pengelola	-	-		
401	Penghentian Aset Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021		368	2.379.697.315	225	108.854.050

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas. tidak terdapat Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Alat Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	593	2.488.551.365	0	0
Rusak Ringan	0	0	-	-
Rusak Berat	0	-	-	-

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan rumah Tangga pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp. 2.488.551.365,-).

f. Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 56 unit senilai Rp. 373.373.746.-. jumlah tersebut merupakan saldo akhir, terdapat mutasi tambah senilai Rp. 398.110.000,- dan mutasi kurang senilai Rp. 674.640.000,-

Tabel 3.6
Ringkasan Mutasi Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar Per Jenis Transaksi
Balai KIPM Jakarta II Tahunan. Per 31 Desember 2025

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2024 (Audited)		53	650.904.746	3	705.000
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
102	Transfer Masuk	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	2	398.110.000	-	-
177	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
302	Transfer Keluar	-	-	-	-
304	Reklasifikasi Keluar	1	278.840.000	-	-
305	Koreksi Pencatatan	1	396.800.000	-	-
401	Penghentian Aset Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		53	373.374.746	3	705.000

Dari jumlah Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar di atas. tidak terdapat Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

**Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025**

Uraian Kondisi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	53	373.374.746	3	705.000
Rusak Ringan	0	0	-	-
Rusak Berat	0	-	-	-

Akumulasi Penyusutan Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 155.019.746.-

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp.0.- jumlah tersebut merupakan saldo akhir dan terdapat mutasi kurang sebanyak 5 unit senilai Rp. 49.172.550,- sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 3.8

**Ringkasan Mutasi Alat Kedokteran dan Kesehatan
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Jakarta II
31 Desember 2025**

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2024 (Audited)		5	49.172.550	-	-
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
102	Transfer Masuk	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-	-	-
177	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
302	Transfer Keluar	5	49.172.550	-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		0	0	-	-

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, tidak terdapat Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Alat Kedokteran dan Kesehatan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0	-	-
Rusak Ringan	0	0	-	-
Rusak Berat	0	-	-	-

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.(49.172.550.-)

h. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium (3.08) pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 156 unit senilai Rp. 5.820.634.120,- Terdapat mutasi tambah sebanyak 7 unit senilai Rp. 109.382.550,- dan berkurang sebanyak 5 unit senilai Rp. 413.201.000,- sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 3.10
Ringkasan Mutasi Alat Laboratorium
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Jakarta II
31 Desember 2025

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2024 (Audited)		154	6.124.452.570	4	836.000
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
102	Transfer Masuk	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	7	109.382.550	1	363,000
177	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset	-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
302	Transfer Keluar	-	-	-	-
304	Reklasifikasi Keluar	5	413.201.000	4	836.000
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		156	5.820.634.120	1	363,000

Dari jumlah Laboratorium di atas, tidak terdapat Alat Laboratorium yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Alat Laboratorium Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	156	5.820.634.120	-	-
Rusak Ringan	0	0	-	-
Rusak Berat	0	-	-	-

i. Alat Persenjataan (3.09)

Balai KIPM Jakarta II tidak memiliki saldo alat persenjataan (3.09) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode semester II TA. 2025 per 31 Desember 2025

j. Komputer (3.10)

Saldo Komputer (3.10) pada Laporan Kuasa Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 169 unit senilai Rp. 1.416.351.196.- jumlah tersebut merupakan saldo awal dan tidak terdapat mutasi tambah/ atau kurang sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 3.12
Ringkasan Mutasi Komputer
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Jakarta II
31 Desember 2025

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2024 (Audited)		169	1.416.351.196	-	-
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
102	Transfer Masuk	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-	-	-
177	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
302	Transfer Keluar	-	-	-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		169	1.416.351.196	-	-

Dari jumlah Alat Komputer di atas. tidak terdapat Alat Komputer (3.10) yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses pemindahtanganan.

Dari jumlah Komputer (3.10) di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Komputer (3.10) Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	169	1.416.351.196	-	-
Rusak Ringan	0	0	-	-
Rusak Berat	0	-	-	-

k. Peralatan Proses/ Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi (3.17) pada Laporan Kuasa Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1 unit senilai Rp. 11.769.000,- jumlah tersebut merupakan saldo awal dan tidak terdapat mutasi tambah/ atau kurang sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 3.16
Ringkasan Mutasi Peralatan Proses/Produksi (3.17)
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Jakarta II
31 Desember 2025

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2024 (Audited)		1	11.769.000	-	-
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
102	Transfer Masuk	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-	-	-
177	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
302	Transfer Keluar	-	-	-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		1	11.769.000	-	-

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi (3.17) di atas. tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses pemindahtanganan.

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi (3.17) di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Peralatan Proses/Produksi (3.17) Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	11.769.000	-	-
Rusak Ringan	0	0	-	-
Rusak Berat	0	-	-	-

Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi (3.17) pada Laporan Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. (11.769.000.-).

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5.482.469.374.- jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 2 Unit dengan nilai sebesar Rp 5.361.406.003.- terdapat mutasi senilai Rp. 121.063.371,- pada Aset Gedung dan Bangunan Periode Semester II TA.2025 per 31 Desember 2025.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5.482.469.374.-.

Tabel 4.1
Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung
Pada Balai KIPM Jakarta II Per 31 Desember 2025

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2025 (Audited)		2	5,361,406,003	-	-
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-	-	-
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	-	-	-
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	-	-	-	-
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	-	-	-	-
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	-	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-	-	-
204	Koreksi pencatatan nilai (+)	0	121,063,371		
208	Pengembangan Melalui KDP	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-	-	-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		2	5.482.469.374	-	-

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas. tidak terdapat bangunan gedung yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Bangunan Gedung Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	5.482.469.374	-	-
Rusak Ringan	0	0	-	-
Rusak Berat	0	-	-	-

5. Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Saldo Jalan. Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 18.675.000.- jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 2 Unit dengan nilai sebesar Rp 18.675.000.- tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Tabel 5.1
Mutasi Jalan. Irigasi dan Jaringan
Pada Balai KIPM Jakarta II Per 31 Desember 2025

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2024 (Audited)		2	18.675.000	-	-
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
102	Transfer Masuk	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-	-	-
177	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
302	Transfer Keluar	-	-	-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		2	18.675.000	-	-

Dari jumlah Jalan. Irigasi dan Jaringan di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Jalan. Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	18.675.000	-	-
Rusak Ringan	0	0	-	-
Rusak Berat	0	-	-	-

C. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 28.322.533.301.- nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan. Irigasi. dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1
Nilai BMN Pada Balai KIPM Jakarta II
Per 31 Desember 2025

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	1. Persediaan	262.976.983	0.90	-	0	262,976,983	0.90
	Sub Jumlah (1)	262.976.983	0.90	-	0	262,976,983	0.90
II	Aset Tetap				0	-	
	1. Tanah	10.118.066.000	34.62	-	0	10.118.066.000	34.62
	2. Peralatan dan Mesin	12.593.400.877	43.10	109.922.050	0.31	12.703.322.927	43.41
	3. Gedung dan Bangunan	5.482.469.374	18.76	-	0	5.482.469.374	18.76
	4. Jalan . Irigasi dan Jaringan	18.675.000	0.06	-	0	18.675.000	0.06
	5. Aset tetap Lainnya	-	0	-	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	28.212.611.251	96.54	109.922.050	0.37	28.322.533.301	96.91
III	Aset Lainnya	-	0		0	-	0
	1. Kemitraan dgn Pihak Ke-3	-	0	-	0	-	0
	2. Software	746.600.000	2.55	-	0	746.600.000	0.91
	Sub Jumlah (3)	746.600.000	2.55		0	746.600.000	0.91
	Total	29.222.188.234	99.63	109.922.050	0.37	29.332.110.284	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca sebagai berikut :

Tabel C.2
Nilai Penyusutan BMN Pada Balai KIPM Jakarta II
Per 31 Desember 2025

No.	Uraian Neraca	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel		Gabungan	
		R	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	11.766.775.843	58.17	93.928.050	0.46	11.860.703.893	58.64
2	Gedung dan Bangunan	889.502.218	4.40	-	-	889.502.218	4.40
3	Jalan. Irigasi dan	11.001.668	0.05	-	-	11.001.668	0.05
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	12.667.279.729	62.92	93.928.050	0.46	12.761.207.779	63.09
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dgn Pihak Ke	-	-	-	-	-	-
2	Software	7.466.000.000	36.91	-	-	7.466.000.000	36.9
3	Aset Tetap Henti Guna	-	-	-	-	-	-
4	ATB Henti Guna	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	7.466.000.000	36.91	-	-	7.466.000.000	-
	Total	20.133.279.729	99.53	93.928.050	0.46	20.227.207.779	100

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel C.3
Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Pada Balai KIPM Jakarta II
Per 31 Desember 2025

No.	Uraian Neraca	Laporan	Laporan	Selisih
		Barang	Keuangan	
1	Persediaan	262.976.983	262.976.983	-
2	Tanah	10.118.066.000	10.118.066.000	-
3	Peralatan dan Mesin	12.593.400.877	12.593.400.877	-
4	Gedung dan Bangunan	5.482.469.374	5.482.469.374	-
5	Jalan. Irigasi dan Jaringan	18.675.000	18.675.000	-
6	Aset Tetap Renovasi	-	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
8	Akumulasi penyusutan	(12.667.279.729)	(12.667.279.729)	-
9	Aset Tak Berwujud	746.600.000	746.600.000	-

10	Amortisasi aset tak berwujud	(746.600.000)	(746.600.000)	-
	Total	15,808,308,505	15.808.308.505	-

IX. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Pengguna BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IX.2
Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN
Pada Balai KIPM Jakarta II
Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Neraca	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Proses Usulan Penetapan Status (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	10.118.066.000	10.118.066.000	-	
2	Peralatan dan Mesin	12.593.400.877	12.593.400.877	-	
3	Gedung dan Bangunan	5.482.469.374	5.482.469.374	-	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.675.000	18.675.000	-	
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
6	Aset Tak Berwujud	746.600.000	746.600.000	-	
	Jumlah	28.959.211.251	28.959.211.251	-	

Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Balai KIPM Jakarta II Per 31 Desember 2025

1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam Proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam Proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-

7	Tindaklanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	-	-	-	-	-

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas. tidak terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan.

b. Pengelolaan BMN Idle

Balai KIPM Jakarta II tidak memiliki BMN Idle sampai dengan akhir periode 31 Desember 2025. Seluruh aset dimanfaatkan sendiri oleh Balai KIPM Jakarta II.

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang terindikasi sebagai BMN <i>idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>idle</i> oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>idle</i> oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penggunaan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berasal Dari Pengelolaan BMN Periode Tahunan TA.2025

Balai KIPM Jakarta II tidak memiliki pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) selain pendapatan jasa karantina perikanan yakni PNBP yang merupakan hasil pemanfaatan Barang Milik Negara per 31 Desember 2025 adalah Rp 0.-.

No	Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan/ Penurunan
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	425122	Pendapatan Pemindahtanganan	-	-	-
4	425141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
Total			-	-	-

2. BMN dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

Balai KIPM Jakarta II tidak memiliki BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada Entitas Pelapor per 31 Desember 2025.

3. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar BMN Rusak Berat

Tidak terdapat Laporan BMN Rusak Berat pada Balai KIPM Jakarta II per 31 Desember 2025 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IX.3
Ringkasan BMN Rusak Berat Pada Balai KIPM Jakarta II
Per 31 Desember 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	NIHIL				
2					
Total				-	-

b. Daftar Barang Hilang

Balai KIPM Jakarta II tidak memiliki barang hilang sampai pada periode 31 Desember 2025.

Penanggungjawab
Kuasa Pengguna Barang

Dedi Supardi